

 pikul@perkumpulanpikul.org
 www.perkumpulanpikul.org
 <http://www.facebook.com/perkumpulan.pikul>
 [@pikulers](https://twitter.com/pikulers)
 <http://www.youtube.com/pikulers>

MIGRAN MISKIN TAK BER-ASET DI KOTA KUPANG

RISET BASELINE:

oleh

Wahyu Adiningtyas
Torry Kuswardono
Margareth Heo
Ody Messakh



2010



PERKUMPULAN PIKUL
LINGKAR BELAJAR KOMUNITAS BERVISI

Jl. Cak Doko, No.4
Kel. Oebobo,
Kupang - NTT, Indonesia, 85111
Telp/Fax: 0380 - 833226

**RECLAIM
YOUR
FUTURE!**

MIGRAN MISKIN TAK BER-ASET DI KOTA KUPANG

Peneliti:

Wahyu Adiningtyas
Torry Kuswardono
Margareth Heo
Ody Messakh

2010



Perkumpulan Pikul

Jl. Wolter Monginsidi II No. 2
Kel. Pasir Panjang, Kupang
Nusa Tenggara Timur
www.perkumpulanpikul.or.id



Daftar Isi

Daftar isi	2
I. Pendahuluan	3
II. Sekelumit tentang Migrasi Desa-Kota dan Kemiskinan	5
III. Kupang, Kota Persinggahan yang penting	7
IV. Hasil Survei	11
V. Kesimpulan	21
Referensi	22

I. Pendahuluan

Survei ini merupakan bagian dari Proyek Baseline di PIKUL. Tujuannya untuk memperoleh informasi awal pemenuhan hak dasar migran yang tidak memiliki aset dan mengetahui persepsi mereka mengenai pemenuhan hak dasar. "Migran yang tidak memiliki aset" dipilih sebab kelompok inilah yang paling rentan terhadap perlindungan hak dasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara, dalam hal ini pemerintah Kota Kupang. Hak dasar tersebut meliputi hak atas kesehatan, pangan, pemukiman, pekerjaan, dan sebagainya. Belum ditemukan penelitian serupa yang dilakukan di Kota Kupang padahal urbanisasi di berbagai wilayah memicu pertumbuhan penduduk yang tinggi, sementara daya dukung ekologi terhadap pertumbuhan penduduk tidak bertambah bahkan cenderung berkurang. Kurangnya daya dukung ekologi ditambah kurangnya kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hak dasar, menyebabkan tingkat kesejahteraan migran tak bereset menjadi sangat rendah.

"Migran" yang digunakan dalam survei ini mengacu pada migran semasa hidup yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahannya. Yang dalam teori ini migrasi diperoleh dari keterangan tempat tanggal lahir dan tempat tinggal sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda maka termasuk migrasi semasa hidup¹.

Migran disini juga lebih ditekankan kepada migran yang tidak memiliki aset tetap. Secara akuntansi, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang secara umur lebih dari satu tahun dan tidak mudah diubah menjadi kas. Biasanya dibeli untuk tujuan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh dari aset tetap ini adalah rumah, tanah, dan kendaraan bermotor. Meskipun disini tukang ojek yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengojek dimasukan sebagai responden juga. Motor yang dimiliki oleh tukang ojek disini dianggap sebagai alat kerja, dan kebanyakan dibeli dengan mengkredit dari dealer. Pendapatan tukang ojek umumnya di bawah upah minimum kota dan propinsi.

Metode penelitian yang dipilih adalah survei dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Groups Discussion/FGD*). Pengumpulan data menggunakan *Purposive sampling*, karena tidak ditemukan jumlah dan nama migran yang tidak memiliki aset di Kota Kupang. Jumlah Responden ditentukan 500 orang dengan mempertimbangkan waktu dan besarnya anggaran survei.

Survei diawali dengan sebuah diskusi terfokus dengan aktivis LSM yang bekerja dengan kelompok rentan di Kota Kupang untuk menentukan wilayah penyebaran kuisioner. Wilayah Kota Kupang terdiri atas 4 kecamatan². Dari keempat kecamatan tersebut diambil beberapa kelurahan, sebagai berikut:

¹<http://www.bps.go.id/aboutus.php?glos=1&ist=1&var=M&cari=&kl=2>

²Penelitian ini dibuat tahun 2010, Kota Kupang saat itu masih terdiri atas 4 kecamatan.

Tabel 1. Daftar kelurahan

Kecamatan	Kelurahan
Kelapa Lima	Lasiana Oesapa Oesapa Selatan Kelapa Lima Fatubesi
Oebobo	Tuak Daun Merah Naikoten Kayu Putih Oebufu Airnona*
Maulafa	Sikumana Kolhua Naikolan
Alak	Alak Namosain Mantasi Manulai II

Sebelum survei, dilakukan pre-survei untuk mengidentifikasi kantong-kantong pemukiman migran yang terbanyak berdasarkan pengamatan. Dari pre-survei diperoleh tambahan satu kelurahan yaitu Airnona. Survei dilakukan selama 3 minggu dari 15 Maret hingga awal 5 April 2010 dan melibatkan 25 enumerator.

Satu hal penting yang perlu mendapat catatan adalah proporsi jumlah perempuan dan laki-laki dalam survei tidak proporsional. Berdasarkan hasil survei, jumlah responden perempuan hanya 1/3 dari responden laki-laki. Satu-satunya wilayah yang jumlah responden perempuan lebih banyak adalah Kelurahan Oebufu. Jumlah ini kemungkinan dipengaruhi oleh banyaknya responden yang ditemui di rumah, sehingga kepala keluarga-lah yang menjawab pertanyaan kuisisioner. Yang menarik, saat FGD dilakukan justru yang paling banyak datang adalah perempuan. Di Kelurahan Kelapa lima dari responden laki-laki. Sehingga penentuan jumlah responden laki-laki dan perempuan perlu ditentukan sejak desain riset dibuat.

Untuk memperdalam hasil survei, diadakan diskusi terfokus di 3 kelurahan, yaitu kelurahan Oebufu, Kelapa Lima dan Oesapa. Pemilihan wilayah berdasarkan: perbandingan responden perempuan dan laki-laki, kerawanan terhadap penyakit dan bencana, serta variasi pekerjaan, yang ditemukan dalam survei.

II. Sekelumit tentang Migrasi Desa-Kota dan Kemiskinan

Berdasarkan laporan revisi yang dibuat oleh Departement of Economic and Social Affairs (DESA) tahun 2007, tentang Prospek Urbanisasi Dunia, penduduk di Asia yang tinggal di perkotaan tahun 2050 akan berjumlah 1,8 miliar. Tahun 2008, diperkirakan, di Indonesia 50% penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia 1,49% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 5,59% per tahun³. Di Kota Kupang, yang terkategori sebagai kota sedang⁴, juga terjadi percepatan jumlah penduduk, berdasarkan sensus 2010 laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,53%, dan ini lebih tinggi dari tahun 2000 yang angkanya 3,1%.

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan ini tentunya diakibatkan oleh meningkatnya jumlah migrasi ke daerah perkotaan dan semakin banyak daerah pedesaan menjadi perkotaan. Hasil survei PBB tahun 1977 menemukan orang-orang desa yang miskin “didorong” pindah ke kota karena berkurangnya kesempatan kerja di desa, dan disaat yang bersamaan “tertarik” oleh harapan untuk mendapat pekerjaan lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi⁵. Todaro dan Stilkind (1981) juga mengatakan, salah satu sebab utama dari urbanisasi adalah tekanan kebijakan terhadap industrialisasi modern. Kebijakan yang lebih mementingkan industri dan mengabaikan sektor pertanian, ditambah dengan kecenderungan yang mementingkan kota (urban bias) dalam investasi pemerintah di bidang sarana umum, semakin mendesak dan merangsang kaum miskin di desa untuk pindah ke kota-kota besar⁶. Secara singkat, dalam urbanisasi terdapat 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah faktor pendorong, yaitu kondisi kehidupan teramat parah di pedesaan daripada perkembangan ekonomi di kota. Sebagai contoh, dari studi yang dilakukan di 27 negara Asia dan Amerika Latin menunjukkan bahwa di daerah yang pertambahan penduduknya sangat pesat, dan pemilikan tanah sempit atau distribusi tanah sangat tidak merata, akan terjadi arus migrasi yang pesat ke kota-kota⁷. Kedua adalah faktor penarik yang kebanyakan merupakan harapan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Migrasi yang selalu meningkat tahun ke tahun mengakibatkan kota mengalami urbanisasi, yang oleh Soekanto (1969) didefinisikan sebagai suatu proses pembengkakan atau penggelembungan kota yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Urbanisasi akan menurunkan daya dukung sosial ekologi terhadap warganya. Todaro dan Stilkind menyatakan, salah satu gejala ledakan tumbuhnya kota yang terlalu pesat yaitu pemerintah semakin tidak

3Kuswantojo, Tjuk.2010. Isu Strategis, Kebutuhan, dan Terobosan Pengembangan Kawasan Permukiman, dalam Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Penyunting: Suparti Amir Salin dkk. Bandung:KKPP SAPPK ITB. Hal 192

4Kota dengan penduduk 200-400 ribu jiwa.

5Todaro, Michael P. dan Jerry Stilkind. 1991. Dilema Urbanisasi, dalam “Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Penyunting: Chris Manning, dan Tadjuddin Noer Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 10.

6Ibid, hal 1

7Ibid, hal 27

mampu memberikan pelayanan publik, perumahan dan transportasi yang memadai bagi warganya. Pada banyak kota hal ini ditandai dengan munculnya rumah-rumah kumuh di perkampungan padat, biaya transportasi yang mahal, kemacetan, rusaknya drainase yang seringkali menyebabkan banjir, angka pengangguran yang semakin tinggi, sulitnya memperoleh bahan makanan, dan status kesehatan warga kota yang rendah. Meskipun di sisi lain jumlah kendaraan pribadi bertambah, rumah-rumah mewah bertebaran, tumbuh tempat-tempat rekreasi yang mahal, serta munculnya berbagai fasilitas kesehatan swasta yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh warga kota.

Menurut David Harvey (1973) kondisi kontradiktif dalam perkotaan ini pada dasarnya merupakan bagian dari gerak internal dalam kapitalisme itu sendiri. Dorongan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, melalui produksi surplus modal, mengkonstruksikan rezim politik perkotaan tertentu yang bekerja dalam logika ini. Gerak modal inilah yang akan selalu mencoba untuk mengeliminasi bagian-bagian sistem perkotaan yang dianggap tidak menguntungkan dan secara simultan mendorong secara massif bagian-bagian yang dianggap menguntungkan bagi gerak keseluruhan kapitalisme itu sendiri. Dalam teori ini, maka pembacaan atas fakta-fakta yang saling berbenturan, seperti terjadinya proses penghancuran barang-barang publik dengan pembangunan massif atas barang-barang swasta bukanlah sesuatu yang tidak terencana dan tanpa perhitungan.

Murray (1992) menyatakan urbanisasi sebagai sebuah hasil dominan dari pasar kapitalistik akan mengancam kehidupan kota dan warganya⁸. Karakter kapitalisme itu sendiri tidak hanya mengancam “ekonomi alamiah” seperti pertanian subsisten, pertukangan dsb, tetapi juga mengancam setiap dimensi dari “masyarakat organis” seperti hubungan kekerabatan hingga *localist allegiances* (*keterikatan batin dengan tempat tinggalnya*). Urbanisasi mengancam alam, tanah, flora, fauna dan eko-komunitas kompleks -yang telah membentuk kehidupan dan berbagai hubungan sosial, dengan mengubah segala hal yang “alamiah” menjadi anorganik dan menjadi bentuk-bentuk yang lebih sintetik. Yang paling terkena dampak dari menurunnya daya dukung sosial ekologi tersebut adalah masyarakat miskin, terutama kaum migran yang tinggal di perkampungan-perkampungan kumuh.

⁸Bookchin, Murray. 1995. *From Urbanization to Cities*. New York: Cassell. 1995. Hal 181

III. Kupang, Kota Persinggahan yang penting

Sejatinya, Kota Kupang merupakan kota para migran, yang wilayahnya terbentuk dari aktivitas persinggahan dan perdagangan -awalnya hanya transaksi lilin dan madu dengan pedagang luar. Sejak awal abad 18, Kupang menjadi tempat persinggahan bagi para pencari teripang dari Johor ke Pantai Utara Australia, melalui jalur Selat Malaka- Laut Jawa-Selat Lombok-Laut Timor. Kupang juga menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang pada jalur perdagangan selatan yang melalui Laut Sabu-Atapupu/Lifau-Pantai Barat Timor-Kupang ke pantai-pantai selatan di Timor. Bagi para pedagang di jalur tersebut diantara tempat-tempat di bagian Barat Kepulauan Maluku dan Australia, Kupang merupakan tempat yang strategis. Hogendorf (Abad 18) dalam laporannya menyebutkan bahwa pelabuhan terbaik di daerah tersebut adalah Kupang dan Dili. Karena posisinya itulah, tak heran jika Belanda memutuskan Kupang menjadi pusat pengendalian administrasi dan kekuasaannya di Nusa Tenggara. Disamping alasan lainnya, yaitu persaingan dengan Inggris dan adanya isu mengenai emas dan tembaga di Pulau Timor.

Berdasarkan sebuah catatan mengenai Pulau Timor yang termasuk di dalamnya memuat tentang Kupang, disebutkan sebagai daerah miskin, berpenduduk padat, kering dan kurang produktif. Di pasar, di Ibukota Kupang dan Bau bau, penduduk hanya menjual sirih pinang, ayam, bawang dan gading (-maksudnya tanduk) kerbau kering.⁹ Bahan pangan untuk konsumsi Belanda, seperti beras, kacang hijau dll, lebih banyak diperoleh dari wilayah sekitar Kupang terutama Rote dan Sabu.

Masuknya Belanda ke Kupang membuat pertambahan penduduk di Kupang meningkat. Penduduk datang tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga didatangkan oleh pemerintah Belanda untuk kepentingan politik dan pertahanan serta logistik. Para migran tersebut membentuk pemukiman-pemukiman baru disekitar Kupang, yang namanya sesuai dengan daerah asal mereka, seperti Kampung Rote, Kampung Solor, Sabu dll¹⁰. Catatan lain diberikan oleh Fox, bahwa Belanda menarik penduduk dari pulau-pulau sekitar terutama Rote, dan dari Sabu serta Solor, sebagai perlindungan terhadap serangan-serangan yang mungkin dilancarkan oleh Raja Sonbai dan Portugis hitam. Tahun 1950 kira-kira 60% dari penduduk swaparaja Kupang yang berjumlah 60.000 bukan orang Timor¹¹. Mayoritas adalah Rote, dan menguasai lahan-lahan subur yang ditinggalkan oleh Kerajaan-kerajaan Timor. Ditangan para migran ini, lahan-lahan yang subur tersebut menjadi lumbung-lumbung pangan bagi penduduk Kota Kupang. Perlahan, perekonomian di Kupang, dikuasai oleh Rote, Sabu dan pendatang lainnya.

Saat ini luas Kota Kupang 180,27 km². Hasil sensus tahun 2010, jumlah

⁹Ardhana, I Ketut.2005. Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 185.

¹⁰Parimartha, I. Gede.2002. Perdagangan dan di Nusa Tenggara 1815-1915, Jakarta: Penerbit Djambatan.Hal 174.

¹¹Fox, James J. 1996. Panen Lontar. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 242

penduduknya 335.585 jiwa¹², dan memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di NTT yaitu sebesar 2.024 orang per kilometer persegi. Bisa dibandingkan dengan kepadatan rata-rata di Provinsi NTT yang angkanya 94 orang per kilometer persegi, padahal luas Kota Kupang sendiri hanya 0,33 % dari luas NTT. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh sebuah surat kabar kepada Walikota Daniel Adoe, laju pertumbuhan penduduk Kupang yang sebesar 3,53% per tahun tersebut, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor migrasi desa ke kota daripada kelahiran¹³. Fungsi Kota Kupang sebagai pusat aktifitas administrasi pemerintahan, bagi Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang¹⁴, merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk NTT bahkan wilayah lain di Indonesia untuk bermigrasi ke Kota Kupang. BPS menyebutkan bahwa migrasi yang terjadi karena Kota Kupang merupakan pusat perekonomian bagi Propinsi NTT sekaligus pusat pendidikan.

Sebagai pusat tiga aktifitas administrasi pemerintahan, perekonomian dan pusat pendidikan Propinsi NTT mempengaruhi alih fungsi lahan. Wilayah yang semula digunakan sebagai ladang, huma, kebun serta penggembalaan berubah menjadi pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Penurunan luas lahan dari tahun 2004-2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Luas Lahan di Kota Kupang 2004-2009 (ha)

Jenis Lahan	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lahan sawah	616	388	270	336	310	309,1
ladang/huma/tegal kebun	4366,4	1746	4342	1359	2998	2795,54
perkebunan	114,063	NA	NA	155	341	324
padang rumput	385,9	NA	NA	185	1232	1218
Lain-lain	12544,2	NA	NA	2952	4550	4269,21

Sumber: Diolah dari data BPS tahun 2005-2010

Dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2005/2006 dinyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang pesat menjadikan kebutuhan perumahan akan semakin meningkat pula. Sementara luas wilayah daratan yang tetap tidak bisa bertambah, maka pembukaan lahan untuk kepentingan pemukiman harus tetap mempertimbangkan faktor keamanan bagi semua pihak. Lahan pertanian yang diubah menjadi lahan pemukiman tentu akan berakibat pada berkurangnya produksi pangan yang bisa dihasilkan oleh lahan tersebut. Belum lagi lahan produktif yang diubah fungsinya menjadi industri dan infrastruktur yang akan menyita sumber daya air dalam tanah¹⁵. Pada tabel 2 terlihat produksi jagung dari

¹²Angka ini melesat sebesar 30.000 jiwa dari proyeksi jumlah penduduk yang dibuat oleh BPS pada tahun 2000, dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 1990-2000, yang angkanya sebesar 305.038 jiwa.

¹³Pello, Hermina. 2010. *Urbanisasi Picu Tingginya Pengangguran*. Pos Kupang. [internet]. Diunduh dari <http://www.pos-kupang.com/read/artikel/51808/kupangnews/kupangplus/2010/8/21/urbanisasi-picu-tingginya-pengangguran>. [akses tanggal 21 Agustus 2010]

¹⁴saat survei ini dibuat pemerintah Kabupaten Kupang sedang dalam proses pemindahan pusat administrasinya ke wilayahnya sendiri.

¹⁵Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2006. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2005/2006*. Diunduh dari <http://ntt.academia.org>. [akses 6 Maret 2010]. hal.62

tahun 2005 sampai dengan 2010 cenderung menurun. Meskipun produksi padi cenderung fluktuatif (-kemungkinan juga di pengaruhi oleh faktor cuaca) dan terlihat meningkat, tidak sebanding dengan tingkat konsumsi warga kota. Begitu juga produksi komoditas lain seperti sayur-sayuran dan umbi-umbian.

Tabel 3. Hasil Panen (ton)

Jenis Lahan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Padi Sawah	502	1128	NA	1483,75	968
padi ladang	70	22	NA	2,77	24,24
Jagung (pipil)	2017	1498	NA	1654,64	1302
Ubi kayu	1523	1516	NA	278,6	2929
Ubi Jalar	127	20	NA	15,08	125
Sayur-sayuran	61,01	186,2	NA	19,7	36,76

Sumber: diolah dari data BPS tahun 2006-2010

Angka gizi buruk juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Dinas Kesehatan Kota Kupang menunjukkan, pada tahun 2004 terdapat 411 kasus, tahun 2005 turun menjadi 371 kasus (1,88 persen), tahun 2006 kasus gizi buruk melonjak lagi menjadi 1.552 kasus (6,99 persen) dan tahun 2007 menjadi 514 kasus (4,00 persen), tahun 2008 naik lagi menjadi 1.707 kasus.

Kebutuhan akan perumahan, serta lahan usaha barang dan jasa yang menjadikan tanah semakin bernilai ekonomis membuat isu mengenai pemilikan lahan atau tanah menjadi penting. Sepanjang tahun 1999-2008 tercatat 3 kasus konflik tanah antar masyarakat (dalam 1 garis keturunan) dan antara masyarakat dengan pemerintah¹⁶. Sempitnya lahan di Kota Kupang ditambah minimnya lahan yang landai serta angka kepadatan penduduk yang lumayan tinggi membuat harga tanah semakin meningkat, begitu juga harga rumah sewa maupun kos.

Box. 1

Penelitian mengenai Potensi Konflik dan Bina Damai di Kota Kupang, yang dilakukan oleh Bengkel Appek, PIKUL dan AFSC tahun 2010, menemukan bahwa kasus konflik tanah (dengan mengambil contoh Konflik tanah di Oesapa), akar konfliknya berasal dari perebutan atau pengklaiman tanah atau lahan oleh sekelompok orang yang masih berada dalam satu garis keturunan. Apabila ditelusuri akar penyebab konfliknya, faktor ekonomi menjadi sangat dominan. Kelangkaan sumber daya (tanah) berhadapan dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan akan tanah. Pertambahan penduduk menuntut adanya ruang baru untuk ditempati, sementara kondisi ekonomi masyarakat kota yang belum baik mendorong orang untuk mencari alternatif lain sebagai lokasi melakukan usaha produktif.

Pada bagian sebelumnya juga disebutkan, Berbagai konflik tanah yang terjadi di Kelurahan Oesapa (Keluarga Mandala vs Keluarga Sari, Keluarga Nalle vs Keluarga

¹⁶Disarikan dari Bureni, Vinsen dkk. 2010. Laporan Penelitian Potensi Konflik dan Bina Damai di Kota Kupang. Belum diterbitkan. Kupang: Bengkel Appek, Perkumpulan PIKUL dan AFSC. Hal 30

Sine, Keluarga Kolloh vs Keluarga Koenay, Keluarga Isliko vs Keluarga Koenay, dan Keluarga Pello vs Keluarga Adam) merupakan contoh konflik tanah dengan pola horizontal. Sementara itu, kasus yang melibatkan Keluarga Saubaki vs Pemerintah Kota Kupang merupakan contoh konflik tanah yang bersifat vertikal.

Berkurangnya luas lahan tidak mengurangi serapan tenaga kerja ke sektor primer, meskipun kenaikannya tidak sebesar sektor tersier. Tahun 2005, serapan sektor primer sebesar 5,78%, naik sebesar 0,41% menjadi 6,19 % di tahun 2010. Sedangkan sektor sekunder dan tersier naik sekitar 4,22% dan 3,54 %. Untuk sektor sekunder dari 6,19% (2005) menjadi 10,41% (2010). Sektor tersier di tahun 2005 sebesar 79,85% menjadi 83,39% tahun 2010.

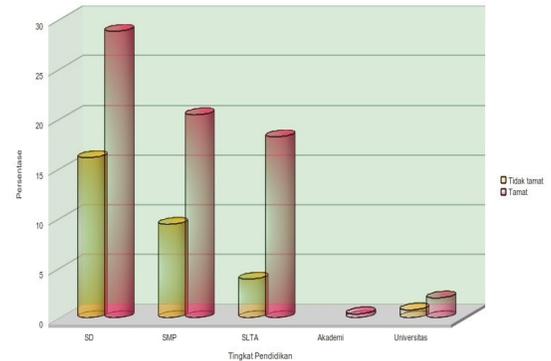
Terserapnya penduduk angkatan kerja di Kota Kupang ke sektor-sektor tersebut, tidak membuat angka pengangguran semakin menurun. Berdasarkan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi NTT, pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka sebanyak 14,12% dari total pencari kerja sebanyak 93.020 orang, dan mengalami peningkatan menjadi 14,28% dari total orang yang bekerja sebanyak 18.433 orang, pada 2009¹⁷. Ketiadaan pekerjaan di kalangan muda juga rawan memunculkan konflik, penelitian mengenai Potensi Konflik dan Bina Damai di Kota Kupang tahun 2010, juga menemukan bahwa banyak generasi muda yang tinggal di beberapa "kampung"/wilayah di Kota Kupang, terutama di lokasi penelitian yang diidentifikasi sebaga pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Tidak adanya pekerjaan ini mendorong para pemuda untuk bekerja di sektor informal, seperti penjaga parkir ataupun ojek. Perebutan lahan parkir atau pangkalan ojek ini seringkali dijadikan alasan melakukan penyerangan antar kelompok.

¹⁷Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.2010.Kondisi Tenaga Kerja.Diunduh dari http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=115. [internet]. Diunduh pada tanggal 10 Januari 2010.

IV. Hasil Temuan Survei

Wajah Responden

Survei migran tak beraset di Kota Kupang mencakup 500 responden yang terdiri dari responden laki-laki sebanyak 370 (74%) dan responden perempuan 130 (26%). Sebanyak 95,8% bekerja, sisanya (4,2%) tidak diperoleh informasi menyangkut pekerjaan mereka. Survei ini mengidentifikasi ada 21 jenis pekerjaan mulai dari buruh lepas sampai anak buah kapal, mulai dari sektor produksi hingga sektor jasa. Responden yang bekerja di sektor primer seperti pertanian sangat sedikit sekali (0,2%).

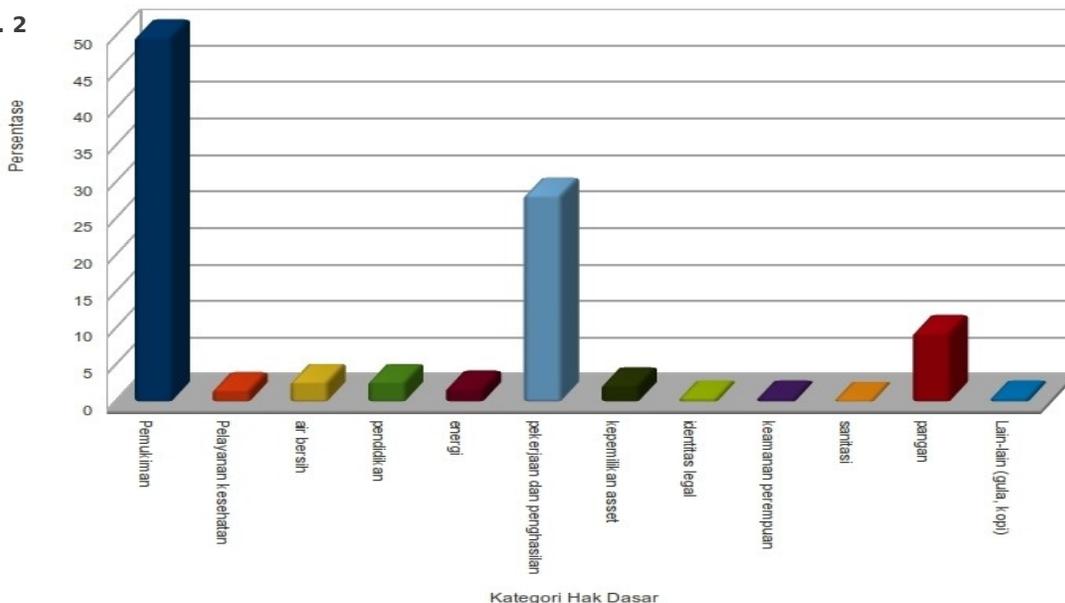


Sebagian besar responden hanya berpendidikan sekolah dasar (28,8%), dan sekitar 16,2% responden tidak tamat SD. Sebanyak 3,2% mengecap pendidikan tinggi, namun 0,8% responden tidak menamatkan studinya di perguruan tinggi. Responden termuda yang ditemui berumur 16 tahun dan tertua berumur 72 tahun, masing-masing 1 orang. Kelompok usia terbanyak dari responden ada pada umur 30 tahun.

Tiada Pekerjaan, Tiada Rumah yang Layak, Tiada pangan yang terpenuhi

Responden memilih Pemukiman (42%) dan Pekerjaan/penghasilan tetap (24%) sebagai kebutuhan dasar yang paling mendesak untuk dipenuhi. Yang menarik, di NTT yang memiliki tingkat kerawanan pangan cukup tinggi, para responden menempatkan pangan (9%) di peringkat 3. Rata-rata responden berargumen jika memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap maka kebutuhan pangan, pendidikan

Grafik. 2



dan lain-lain akan relatif mudah terpenuhi.

Tidak ada perbedaan yang ekstrim antara pilihan responden perempuan dan laki-laki, dalam menempatkan kebutuhan dasar yang paling mendesak hingga paling tidak mendesak untuk dipenuhi, baik secara urutan maupun proporsinya.

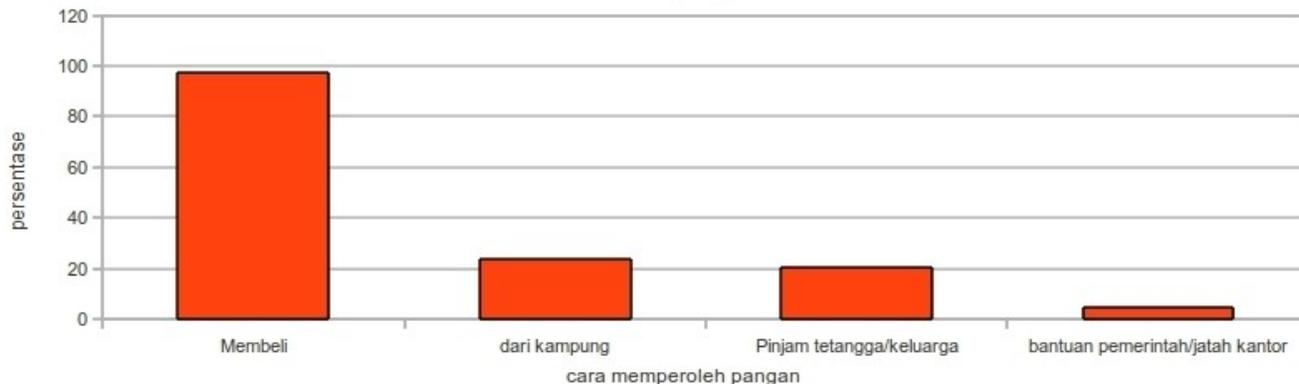
Pangan: dari membeli hingga menunggu RASKIN

“....kalau kiriman dari kampung sama saja, setelah menerima kami harus membayar ongkos bus dan mengirimkan uang ke kampung....” peserta FGD, Kelurahan Kelapa Lima

“Membeli” adalah cara utama responden mendapatkan pangan di Kota Kupang. Jika diurutkan, 97,2 % responden membeli, 23,4 % membawa dari Kampung -meskipun hanya 18,4 % responden yang mengaku hal ini sering dilakukan, dan 20,4 % meminjam dari tetangga atau keluarga. Sedangkan, sisanya, 4,6 % mendapatkan bantuan dari pemerintah atau jatah kantor. Berdasarkan data dari Kota Kupang dalam Angka 2009, warga Kupang menghabiskan 50,9% pendapatannya untuk membeli pangan. Ini artinya sudah masuk dalam kategori ekonomi rumah tangga yang tidak sehat.

Grafik. 3

Hak atas pangan



Secara keseluruhan, hanya 33,6% responden mengaku pernah mendapat raskin. Sisanya, 66,4% tidak mendapat raskin. Bila dipilah berdasarkan pendapatan, sekitar 33% dari responden berpendapatan terendah (Rp.100.000-Rp.499.000 per bulan yang mendapat raskin. Dan sebanyak 35,7% dari responden dengan pendapatan Rp.500.000-Rp.899.000 per bulan yang mendapat raskin. Ini berarti peran negara dalam memenuhi hak atas pangan tidak signifikan dalam kelompok migran ini.

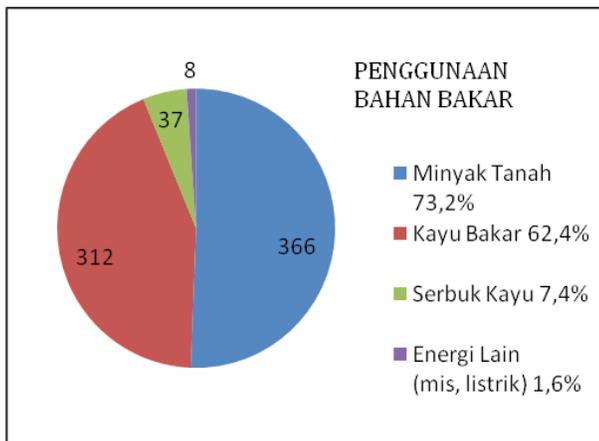
Menurut responden, semakin sempitnya lahan di Kupang juga mempengaruhi harga pangan. Kalau dahulu mereka bisa menanam sedikit di pekarangan,

sekarang sudah tidak bisa lagi. Apabila responden tidak memiliki uang untuk membeli makanan, maka mereka berhutang di kios kecil dekat tempat tinggalnya. Karena sistemnya hutang, maka pembeli dikenakan bunga. Harga beras bisa lebih mahal Rp. 500-Rp.1000 per kg dari harga normal. Karena itu, mereka seringkali tidak memiliki cukup uang dan hidup dari hutang ke hutang. Maka pada dasarnya mereka membeli pangan dengan kualitas paling rendah dan harga lebih mahal.

Responden yang memiliki balita, asupan pangan tidak berbeda dengan makanan mereka sehari-hari, hanya dibuat lebih lembek.

Energi: Bergantung pada yang Terbatas

Sumber Energi untuk Memasak



Sebanyak 75% responden menyatakan sulit mendapatkan bahan bakar minyak, namun seperti yang terlihat di gambar, penggunaan minyak tanah untuk bahan bakar menunjukkan ranking tertinggi (73,2%). Berdasarkan informasi ini penggunaan serbuk kayu dan energi lain yang sangat rendah menunjukkan penggunaan energi alternatif untuk bahan bakar belum dilakukan oleh responden.

Berdasarkan pendapatan, pengguna tertinggi bahan bakar untuk memasak berada pada responden dengan penghasilan Rp 500.000,- - Rp 899.000,-, baik untuk kategori paling sering maupun sering. Pada kelompok ini, responden yang memilih “paling sering” menggunakan minyak tanah sebanyak 41%, sedangkan yang memilih “paling sering” menggunakan kayu bakar sebesar 29,5 %. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang memilih “sering” untuk minyak tanah (23,8%). Untuk penggunaan serbuk kayu, persentasenya justru lebih tinggi pada kategori sering (35,1%) dibanding paling sering (24,3%). Hal ini menggambarkan tingkat ketergantungan responden yang tinggi pada minyak tanah, meskipun ketersediaannya terbatas. Penggunaan kayu bakar yang cukup tinggi memunculkan asumsi bahwa kayu bakar merupakan bahan bakar substitusi saat minyak tanah langka.

Sumber Energi untuk Penerangan

Untuk penerangan, sebanyak 77% responden menggunakan listrik dari PLN, sebanyak 37,6% menggunakan minyak tanah, 23,6 % menggunakan lilin dan

3,0% menggunakan energi lain. Perbedaan yang besar antara pengguna listrik dari PLN dan minyak tanah menggambarkan ada sebagian responden yang hanya tergantung pada energi konvensional ini. Sedangkan pengguna lilin dan energi lain seperti generator, kemungkinan merupakan penggunaan temporer apabila listrik padam. Cukup besarnya penggunaan minyak tanah untuk kebutuhan penerangan, kemungkinan berkaitan dengan beberapa hal, seperti mahalnya biaya pemasangan listrik, sulitnya memperoleh sambungan listrik apalagi jika tinggalnya tidak menetap atau menumpang di tanah orang, dan ketidakmampuan dari responden untuk memperoleh sambungan listrik dari PLN.

Sama halnya dengan energi untuk kebutuhan memasak, pengguna energi untuk penerangan terbesar pada responden dengan kelompok penghasilan Rp.500.000-Rp.899.000.

Air: Ada tapi Sulit

Sekitar 21,1% migran Kota Kupang menggunakan air ≤ 20 liter/orang/hari kondisi ini sebenarnya belum memadai untuk standar kebutuhan masyarakat kota, bahkan masih ada 6,6% yang menggunakan 10 liter/org/hari. Data juga menunjukkan bahwa kondisi kecukupan air (≥100 liter/orang/hari) sekitar 21,6%

Tabel 4
Kondisi kecukupan air

Range	%
1 - 10 ltr	6.6
11 - 15 ltr	5.8
16 - 20 ltr	8.7
21 - 30 ltr	7.7
31 - 50 ltr	24
51 - 75 ltr	12.7
76 - 100 ltr	12.9
> 100 ltr	21.6

Kebutuhan air responden baik saat kemarau maupun musim penghujan cenderung tidak berbeda, begitu juga sumber-sumber air maupun cara memperoleh air konsumsi sehari-hari. Untuk mensiasati sulitnya air, para migran yang tinggal di kos dan tidak memiliki bak penampung kerap kali membeli air tanki secara *berpatungan*. Air tersebut mereka tampung di dalam drum atau gentong besar.

Kesehatan: Minim Biaya dan Akses

“.....sulitnya memperoleh pelayanan gratis dari rumah sakit, bukan saja karena tidak terdata, tapi mengurusnya butuh biaya...untuk membuat KK, KTP dan akta kelahiran...”

Puskesmas (81,2%) menjadi rujukan pertama para responden untuk melakukan pengobatan bagi keluarga, 43,4 % merawat sendiri, 24,8 % membawa ke rumah sakit umum, dan 15,4% membawa ke tim doa. Yang menarik, ada 8,2 % responden membawa ke posyandu untuk memperoleh layanan kesehatan, seperti, pemeriksaan dan obat-obatan. Dari 57 responden yang pergi ke posyandu, 21 orang adalah laki-laki dewasa dan sisanya perempuan dewasa.

Biaya merupakan alasan terbesar para responden (60%) untuk mengakses layanan kesehatan yang resmi seperti puskesmas atau rumah sakit, kedua adalah kedekatan dengan lokasi layanan (40,4%).

migran tak beraset yang tinggal di Kota Kupang ini 89,4% pernah mendengar adanya program-program asuransi kesehatan dari pemerintah seperti GAKIN, Jamkesmas/Askeskin ataupun kartu biru (jamkesda). Namun hanya 49,4 % dari responden yang mendengar tersebut yang memperoleh asuransi dari pemerintah, seperti jamkesmas/askeskin, GAKIN dan jamkesda (kartu biru dll). Dari responden yang memperoleh asuransi dari pemerintah sebanyak 88,9 % merasa terbantu dengan adanya fasilitas ini, sedangkan yang menjawab tidak terbantu, biaya (3%) merupakan hambatan utama.

Pendidikan: Bukan Prioritas!

Pada daftar kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi pendidikan dipilih oleh 13% responden. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pendidikan belum menjadi kebutuhan utama, diantara kebutuhan dasar lainnya seperti pekerjaan, pemukiman dsb. Range pendapatan responden yang paling banyak (80,9%) berkisar antara Rp 100.000 - Rp 899.000,- menunjukkan bahwa pendapatan yang mereka peroleh kemungkinan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

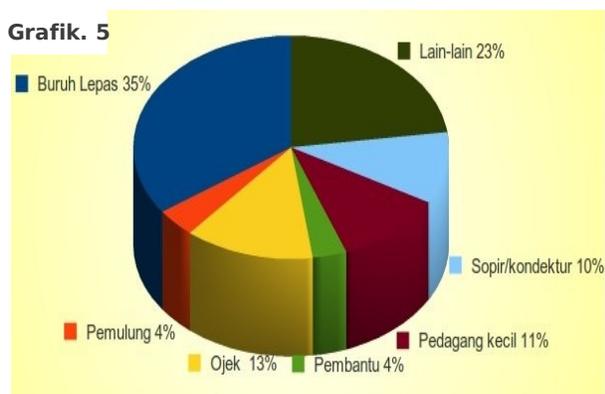
Apabila melihat hasil survei mengenai hambatan untuk pendidikan, ternyata biaya menjadi persoalan utama untuk menyekolahkan anak (31,6 %), kedua adalah kelengkapan administrasi (13,4%), lokasi (13,2%) dan lain-lain (1,8 %). Responden yang memilih biaya sebagai hambatan utama untuk pendidikan adalah responden yang memiliki penghasilan antara Rp 100.000,- - Rp 899.000,-. Biaya juga menjadi hambatan bagi kelompok responden yang memiliki jumlah anak 3, 4 dan 5 dengan persentase berturut-turut 25,3%, 24,1 % dan 21,5%.

Pekerjaan: Bersiap Dibayar Murah

“...suami saya bekerja di Toko Sinar Bangunan, dengan gaji per bulan Rp 850.000,-. tetapi setiap bulan dipotong uang makan sebesar Rp.200.000,- s.d Rp.300.000,- tergantung hari kerja. Jika lembur tidak memperoleh upah. Menurut pemilik toko yang memperoleh upah lembur hanya yang memiliki ijazah SMA saja....” Hermina Bieko, warga Kelurahan Kelapa Lima.

Sekitar 78,9% migran yang bekerja atau mencari kerja di Kota Kupang tidak menyelesaikan pendidikan SLTA, bahkan ada 16,4% yang tidak tamat SD (termasuk buta huruf) atau 45,5% hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD. bila data dikombinasikan dengan jenis pekerjaan yang dilakoni maka kelompok ini sebenarnya yang lebih banyak bekerja sebagai buruh lepas, karena tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi dan lebih mengandalkan tenaga (fisik).

Untuk jenis pekerjaan kaum migran didominasi oleh buruh lepas (35%) diikuti

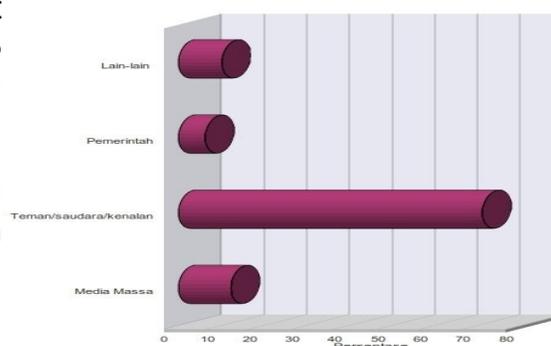


supir / kodektur / ojek 10% dan “papalele” 11%. Jenis pekerjaan dominan diduga lebih banyak diminati disamping karena tidak banyak membutuhkan ketrampilan dan mudah didapat juga berhubungan dengan kemudahan kaum migran untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Kota Kupang. Pekerjaan supir umumnya ada yang dijalani dengan terlebih dahulu mengikuti kursus mengemudi yang resmi lewat lembaga

pelatihan namun ada juga yang terjadi sebagai naik level dari sebelumnya kondektur kemudian diajar untuk menjadi supir.

Informasi pekerjaan lebih banyak didapat melalui teman/saudara/kenalan 82,51% sesuai dengan karakter pekerjaan dominan buruh lepas dan supir/kondektur/ojek. Sebesar 85,8% responden laki-laki mendapatkan informasi pekerjaan melalui teman/saudara/kenalan, sedangkan perempuan 72,6%.

Grafik. 6



Secara keseluruhan data pekerjaan ini berpangkal pada tingkat pendidikan dominan dari kaum miskin migran di Kota Kupang yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan yang ditekuni dan cara mendapatkan informasi pekerjaan.

Box. 2

Deskripsi mengenai keterkaitan antara pendidikan dan pekerjaan yang diperoleh dari FGD di Oesapa. Seorang peserta FGD menceritakan bahwa dirinya sempat memperoleh pendidikan di sekolah menengah atas di kampungnya, lalu pindah SMEA Negeri di Kota Kupang. Namun waktu kenaikan kelas tidak mampu bayar uang sekolah lalu dikeluarkan. Kemudian ia masuk SMEA Kristen, kelas 3, tapi juga tidak mampu membayar uang sekolah sehingga tidak dapat ikut ujian akhir. Karena ia tidak mengikuti ujian, dan tidak memperoleh ijazah, dalam mencari pekerjaan ia akan dihitung berpendidikan SMP saja. Sehingga saat ini ia hanya bisa memperoleh pekerjaan sebagai buruh angkut barang tidak tetap (buruh lepas) dengan pendapatan sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sekitar Rp. 350.000,- per bulan, sebelum dipotong uang makan yang besarnya Rp. 5.000,- per hari.

Rumah adalah prioritas

“..sudah 12 tahun tinggal di Kupang, suami sudah meninggal, anak 3, jualan sayur, selama ini berpindah-pindah kos.....Untuk sewa kamar bebek ukuran 2x3 harus membayar Rp.150.000,- Jika ada kerusakan pemilik tidak mau memperbaiki.....” Ibu Ursula, warga Kelurahan Kelapa Lima.

Bagi 500 responden, sekitar 60,5% dari mereka melihat perumahan adalah permasalahan paling mendesak dalam keluarga. Sekitar 38.4 % dari responden tinggal di rumah sewaan, 12,1% menumpang di rumah atau tanah keluarga, 8.2 % tinggal di tanah negara/perusahaan. Sisanya cukup beragam bahkan ada pula yang tinggal tidak tetap di dalam kota kupang.



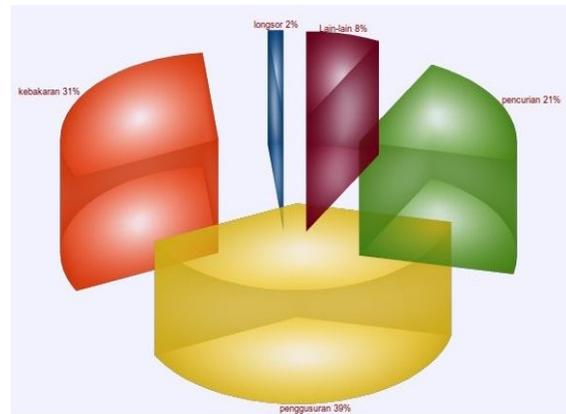
Tabel 5

Jenis Bangunan Tempat Tinggal	%
Permanen	20
semi permanen	37,1
non permanen	42,8
tidak menjawab	0,1

Gambaran lain dari mendesaknya urusan perumahan adalah tingkat kelayakan rumah. Sekitar 42.5% responden tinggal di rumah non permanen, sementara 37.6% tinggal di rumah semi permanen. Hanya sedikit dari mereka yang mampu tinggal di rumah-rumah permanen yang lebih tahan lama.

Grafik 8

Risiko yang dihadapi oleh warga yang tinggal di rumah non permanen nan padat adalah kebakaran (39.2%), pengusuran dan pengusiran (50.4%), serta pencurian. Tinggal di tanah orang memiliki risiko digusur atau diusir dari properti sang empunya. Terlebih tidak ada perlindungan hukum atas warga migran rentan yang tinggal menumpang atau mengontrak di tanah orang. Kelurahan Kayuputih dan Lasiana adalah wilayah yang dipersepsikan oleh responden memiliki peluang pengusuran dan pengusiran tinggi. Kebanyakan dari warga yang khawatir terjadi pengusuran dan pengusiran tinggal di rumah-rumah non permanen (49%).



Risiko lain adalah kebakaran, terutama di wilayah pemukiman padat dengan rumah-rumah semi permanen dan non-permanen berbahan kayu. Kelurahan Oesapa dipersepsikan memiliki peluang mengalami peristiwa kebakaran oleh warganya. Umumnya mereka rumah mereka adalah rumah-rumah semi permanen atau bahkan non permanen.

Warga yang tinggal di rumah-rumah non-permanen dan semi permanen juga memiliki kekhawatiran lain yaitu pencurian. Bahan rumah yang sederhana, memberikan peluang warga yang tinggal di rumah non-permanen dan semi-permanen berhadapan dengan pencurian.

Sanitasi Buruk Berbuah Penyakit

Secara keseluruhan, penyakit yang menurut responden paling sering dialami warga migran di Kota Kupang adalah malaria, kemudian diikuti dengan batuk demam, ISPA, dan diare. Meski demikian pada sejumlah kelurahan dengan kasus-kasus menonjol untuk diare seperti di Kelapa Lima, Kolhua, Naikoten I, dan Penfui.

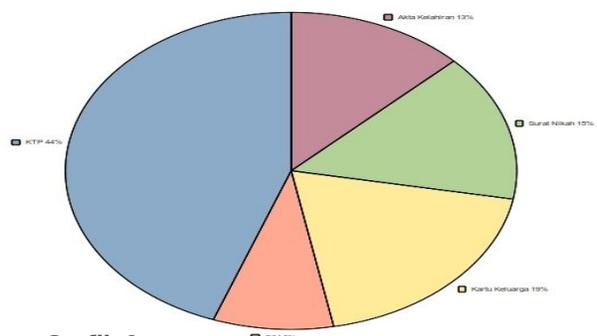
Kejadian batuk demam, ISPA, dan Malaria muncul secara berturutan boleh jadi karena pengetahuan responden yang terbatas untuk membedakan antara ketiga penyakit yang memiliki gejala sama tersebut. Namun demikian, jika kita menggabungkan antara ISPA, dan batuk demam maka tingkat kekerapannya akan sama dengan malaria dan merata seluruh tempat.

Kejadian diare yang cukup menonjol di Kelapa Lima, Kolhua, Naikoten I, dan Penfui boleh jadi terkait dengan kondisi permukiman dan ketersediaan air bersih di ke empat wilayah tersebut. Lebih dari 60 % warga di empat kelurahan tersebut tinggal di rumah non permanen. Sementara itu, di empat kelurahan tersebut konsumsi air per rumah tangga terutama di Kelapa Lima dan Naikoten I mencapai

kurang dari 100 liter per hari.

Identitas Legal: Tetap Tidak Memperoleh HAK-nya

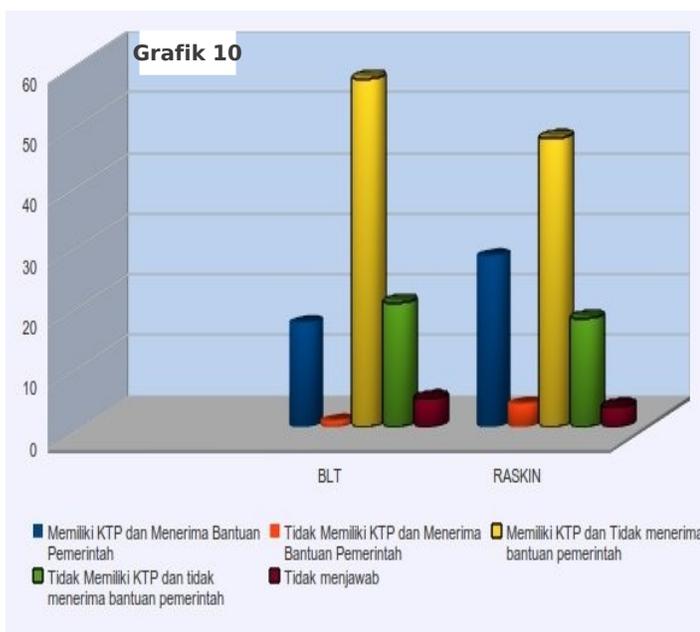
Sekitar 44,8% kelompok migran tak beraset ini memiliki identitas legal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)- yang kebanyakan merupakan KTP daerah asal, 9% memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), kartu keluarga sebanyak 19%, surat nikah 15%, dan akta kelahiran 13%.



Grafik 9

Apabila kepemilikan KTP dikaitkan dengan kepemilikan asuransi pemerintah, sebesar 42,6%, dapat ditarik sebuah asumsi bahwa kepemilikan identitas legal tidak mempengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan dari pemerintah. Ada responden (yang dalam survei ini merupakan penduduk miskin) memiliki KTP namun tidak memiliki asuransi kesehatan dari pemerintah. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan pendataan yang kurang baik atau KTP yang dimiliki responden merupakan KTP daerah asal. Meskipun ternyata kepemilikan KTP juga tidak mempengaruhi kepemilikan askeskin/jamkesmas/jamkesda. Dari 136 responden yang memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah, 122 (89,7%) memiliki KTP dan 14 (10,3%) orang tidak memiliki KTP.

Hal ini berlaku juga untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dari 77,9% yang memiliki KTP, hanya 17,8% yang menerima BLT, 60% tidak menerima BLT, dan 0,8 % tidak memiliki KTP tetapi memperoleh BLT. Demikian pula dengan penerimaan raskin, responden yang memiliki tapi tidak memiliki KTP ada 49%, sedangkan yang menerima raskin hanya 28,9%. Responden yang tidak memiliki KTP tetapi tidak memperoleh raskin sebanyak 3,7%. Berdasarkan informasi ini KTP tidak menjadi jaminan bagi migran untuk memperoleh akses layanan publik dari pemerintah.



Box.3

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sebuah kartu identitas dibutuhkan warga untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, termasuk pengurusan raskin, bantuan langsung tunai maupun jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Namun informasi yang jelas mengenai pembuatan KTP seringkali tidak sampai ke masyarakat, terutama masyarakat miskin. Disisi lain, pelayanan yang kurang ramah dari para pemberi layanan publik dan tidak adanya petugas informasi khusus untuk pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK) atau berbagai dokumen kependudukan, membuat masyarakat enggan bertanya ke dinas kependudukan atau kelurahan setempat.

Berdasarkan FGD, para responden survei yang merupakan penduduk migran, kebanyakan memiliki KTP daerah asal yang sudah kadaluarsa karena sudah lama tinggal di Kota Kupang. Oleh karena minimnya informasi yang diterima, mereka tidak mengetahui prosedur pengurusan KTP Kota Kupang yang sebenarnya tidak dipungut biaya, kecuali untuk pembelian Formulir sebesar Rp. 5.000,-. Akibatnya, mereka hanya memperoleh informasi dari calo yang memberikan tarif Rp. 50.000,- per KTP, plus pengurusan KK sebesar Rp. 25.000,-. Jadi untuk KTP suami istri plus KK mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000,-. Biaya yang besar untuk membuat KTP dan banyaknya kebutuhan lain selain pembuatan KTP, membuat masyarakat miskin menempatkan pengurusan KTP pada posisi yang tidak penting.

Perempuan: Terdiam dan Tidak Aman

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari menghiasi media massa. Menurut Daniel Hurek¹⁸, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kupang pada triwulan I dan III tahun 2009 meningkat secara signifikan. Pada triwulan I tercatat 163 kasus, sedangkan dtriwulan III naik menjadi 196 kasus. Namun dari survei yang dilakukan tidak banyak responden yang menjawab pertanyaan mengenai masalah khusus yang dihadapi perempuan di lingkungannya. Dari 500 responden, hanya 40 orang yang mengisi bagian ini. Sejumlah 29 responden yang menjawab KDRT sebagai masalah perempuan di lingkungannya, dan 9 responden menjawab perkosaan. Pelecehan dan kekerasan seksual masing-masing 3 responden yang menjawab. Sisanya menjawab lain-lain.

Kemungkinan hal ini terjadi karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani secara tertutup di dalam keluarga atau orang-orang terdekat. Sehingga kurang diketahui oleh tetangga. Perempuan sendiri masih menganggap tidak etis atau tabu untuk membicarakan masalah KDRT, pelecehan seksual, maupun kekerasan seksual yang dialaminya ke publik. Namun adanya jawaban pada bagian ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat telah berani mengangkat persoalan yang dianggap privat ke ruang publik.

¹⁸Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Kupang Meningkat, Selasa, 27 Oktober 2009, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=8453>

V. Kesimpulan

Perumahan menempati posisi pertama dari hak dasar yang menurut responden paling utama untuk dipenuhi, disusul oleh pekerjaan dan kebutuhan akan pangan. Isu tentang perumahan tidak hanya mengenai kepemilikan atau masalah kelayakan huni saja, namun juga masalah akses yang mudah terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh warga kota. Seringkali kebijakan terhadap rumah bagi warga miskin tidak tepat sasaran dan strateginya. Rumah-rumah kumuh masyarakat miskin direlokasi jauh dari tempat mereka melakukan aktivitas pekerjaan, sehingga biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh mereka semakin tinggi. Apalagi kebanyakan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin tidak memperhatikan aspek transportasi yang memudahkan mereka melakukan mobilitas. Akibatnya, rumah-rumah sangat sederhana yang disediakan oleh pemerintah ditinggalkan bahkan tidak dilirik oleh masyarakat miskin di perkotaan karena letaknya jauh di luar kota.

Masalah lapangan pekerjaan juga menjadi PR besar pemerintah kota. Ketersediaan tenaga kerja yang besar yang sejatinya memudahkan moda industri untuk selalu memiliki cadangan tenaga kerja yang muda dan murah, menghasilkan banyaknya pengangguran dan munculnya sektor-sektor informal di perkotaan. Kupang sebagai kota yang mulai menggeliat melakukan pembangunan beban pengangguran akibat migrasi desa kota ini juga patut diperhitungkan.

Ledakan penduduk dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan untuk pertanian, juga menyebabkan para responden memandang pangan sebagai kebutuhan dasar yang penting untuk dipenuhi. Ironi kurangnya pangan ini juga diperberat dengan semakin tingginya tuntutan-tuntutan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sebagai manusia modern, yang segalanya dikalkulasi oleh uang. Jika dahulu mungkin masyarakat masih bisa mengandalkan beras atau jagung kiriman dari kampung, saat ini mereka harus memberikan uang kembali ke kampung yang jumlahnya juga relatif lebih besar dari harga beras yang mereka beli di kota untuk jumlah yang sama. Apabila dulu mereka dapat berutang beras, sekarang tidak lagi. Jika berhutang maka harus membayar lebih mahal untuk jumlah yang sama.

Secara umum hak dasar masyarakat terhadap perumahan yang layak dan mudah aksesnya, pekerjaan/penghasilan yang tetap, pangan, fasilitas kesehatan yang baik, rasa aman dan sebagainya masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin, dalam hal ini para responden yang merupakan masyarakat migran. Warga miskin semakin tersingkir dari kota itu sendiri. Masyarakat migran tidak bisa memperoleh haknya atas kota, yang menurut David Harvey bukan hanya sebagai kebebasan individu untuk mengakses sumber daya perkotaan, akan tetapi lebih dari itu, hak atas perkotaan adalah hak untuk mengubah diri kita melalui mengubah kota itu sendiri. David Harvey juga menegaskan bahwa proses ini adalah sebuah proses yang melibatkan aksi kekuasaan kolektif untuk mendorong proses perkotaan yang demokratis.

Referensi

Buku

- Ardhana, I Ketut. 2005. Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boochim, Muray. 1995. From Urbanization to Cities: Toward A New politics of Citizenship. 2nd Ed. London: Cassel
- Eriyanto. 2007. Teknik Sampling: Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKis
- Evers, Hans-Dieters, Rudiger Korff. 2002. Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-ruang Sosial. Penerjemah, Zulfahmi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fox, James J. 1996. Panen Lontar. Penerjemah, Ling Matsay. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Harvey, David. 1985. The Urbanization of Capital: Studies in The History and Theory of Capitalist Urbanization. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Harvey, David. 1973. Social Justice and The City. London: Edward Arnold
- Jellinek, Lea. 1994. Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Penerjemah, Eddy Zainuri. Jakarta: LP3ES
- Kuswartojo, Tjuk. 2010. Isu Strategis, Kebutuhan, dan Terobosan Pengembangan Kawasan Permukiman, dalam Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Penyunting: Suparti Amir Salin dkk. Bandung: KKPP SAPPK ITB.
- Maning, Chris, Tadjuddin Noer Effendi. ed. 1991. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Penerjemah, Al Ghozy Usman dan Andre Bayo Ala. Jakarta: Yayasan Obor
- Nurmandi M.Sc., Drs. Achmad. 1992. Manajemen Perkotaan. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa
- Parimatha, I. Gde. 2002. Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915. Jakarta: Penerbit Djambata.n
- Rahardjo, Supratikno. 2007. Kota-kota Prakolonial Indonesia. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya (FIB) Universitas Indonesia.
- Wertheim, W.S. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial. Penerjemah, Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Sumber internet

Badan Pusat Statistik.2009.Istilah Statistik.Diunduh dari <http://www.bps.go.id/aboutus.php?glos=1&ist=1&var=M&cari=&kl=2> [diakses pada 20 Desember 2010]

Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010 Kota Kupang: Angka Agregat per Kecamatan. BPS Kota Kupang [internet]. Diunduh dari http://ntt.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Ahasil-sensuspenduduk-2010&catid=1%3Aberita&Itemid=74 [diakses pada Oktober 2010]

Badan Pusat Statistik Kota Kupang.2006.Kota Kupang dalam Angka 2005/2006. Diunduh dari <http://ntt-academia.org/statistik-ntt.html> [diakses pada April 2010]

Badan Pusat Statistik Kota Kupang.2006.Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2005/2006. Diunduh dari <http://ntt-academia.org/statistik-ntt.html> [diakses pada April 2010]

Badan Pusat Statistik Kota Kupang.2006.Profil dan Peta Kemiskinan Kota Kupang 2006. Diunduh dari <http://ntt-academia.org/statistik-ntt.html> [diakses pada April 2010]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.2010.Kondisi Tenaga Kerja.Diunduh dari http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=115. [internet].Diunduh pada tanggal 10 Januari 2010.

Koran Jakarta. 2009. Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Kupang Meningkat.Koran Jakarta.[internet]. 27 Oktober. Diunduh dari <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=8453> [akses tanggal 2 Desember 2010]

Pello, Hermina.2010.Urbanisasi Picu Tingginya Pengangguran.Pos Kupang [internet].21 Agustus. Diunduh dari <http://pos-kupang/read/artikel/51808/kupangnews/kupangplus/2010/8/21/urbanisasi-picu-tingginya-pengangguran> [akses tanggal 21 Agustus 2010]

Sahdan, Gregorius. 2005. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat,[internet].Maret 2005.Diunduh dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_6.htm [diakses tanggal 6 Oktober 2010]

Timor Express. 2010. Warga Mengeluh,Urus KTP Bertele-tele: Dispenduk Akui Tak Ada Kendala. Timor Express.[internet]. 01 September. Diunduh dari <http://timorexpress.com/index.php/images/images/index.phpact=news&nid=40886> [diakses tanggal 6 September 2010]

Berbagai artikel dari [www.http://kotakupang.com](http://kotakupang.com). [diakses pada Juni-November 2010]